



**WALI KOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 267 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**



2024



WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 267 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2023-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang telah ditetapkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, diperlukan adanya perbaikan kinerja sebagai tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat perubahan kinerja, indikator, formula, dan/atau target kinerja dituangkan dalam dokumen perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan rincian indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Perbaikan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a. hasil reviu kinerja sasaran daerah sebagai indikator kinerja utama pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 - b. hasil reviu kinerja sasaran perangkat daerah sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah; dan
 - c. hasil reviu kinerja program pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Perbaikan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Tabel Perbaikan Kinerja Daerah Periode 2023-2026
 Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran		
						2023		Target			2024		
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah dari BPS	Jumlah lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	11,72 tahun	11,89 tahun	12,11 tahun	11,90 tahun	11,91 tahun	11,92 tahun	12,12 tahun	12,13 tahun	12,14 tahun
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah dari BPS	Jumlah lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	11,72 tahun	11,89 tahun	12,11 tahun	11,90 tahun	11,91 tahun	11,92 tahun	12,12 tahun	12,13 tahun	12,14 tahun
Meningkatnya Kualitas Pariwisata		Lama Tinggal Wisatawan	Lama tinggal wisatawan (Angka LoS) dihitung dari Total lama tamu menginap dibandingkan total tamu menginap	Total lama tamu menginap / total tamu menginap	1,60 hari	1,70 hari	1,87 hari	1,80 hari	1,90 hari	2,00 hari	-	-	-
		Rata-Rata Belanja Wisatawan	Total belanja wisatawan dibandingkan jumlah wisatawan	Rata-Rata Belanja Wisatawan dihitung dari Rata-rata belanja wisatawan nusantara dan mancanegara per kunjungan tahun n	-	-	-	-	-	-	2.000.000 Rupiah	2.025.000 Rupiah	2.050.000 Rupiah
	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	Lama tinggal wisatawan (Angka LoS) dihitung dari Total lama tamu menginap dibandingkan total tamu menginap	Total lama tamu menginap / total tamu menginap	1,60 hari	1,70 hari	1,87 hari	1,80 hari	1,90 hari	2,00 hari	-	-	-
		Rata-Rata Belanja Wisatawan	Total belanja wisatawan dibandingkan jumlah wisatawan	Total belanja wisatawan / jumlah wisatawan	-	-	-	-	-	-	2.000.000 Rupiah	2.025.000 Rupiah	2.050.000 Rupiah
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk		Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Rata-Rata Belanja Wisatawan didapatkan dari Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) didapatkan dari publikasi BPS	Hasil Perhitungan BPS tahun n	0,393 - 0,462 skala 0-1	0,393 - 0,50 skala 0-1	0,454 skala 0-1	0,389 - 0,490 skala 0-1	0,385 - 0,480 skala 0-1	0,381 - 0,470 skala 0-1	0,389 - 0,453 skala 0-1	0,385 - 0,450 skala 0-1	0,381 - 0,440 skala 0-1
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari perhitungan prosentase PDRB ADHK 2010 tahun n, PDRB ADHK 2010 tahun n-1 dan PDRB ADHK 2010 tahun n-1	(PDRB ADHK 2010n - PDRB ADHK 2010n-1)/PDRB ADHK 2010n-1 dikalikan 100%	5,09%	4,20% - 5,40%	5,07%	5,12% - 5,76%	5,22% - 5,96%	5,32% - 6,16%	5,08% - 5,76%	5,09% - 5,86%	5,10% - 6,00%
	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Angka kemiskinan dari BPS	Angka Kemiskinan BPS	7,69%	6,61% - 7,57%	6,49%	6,13% - 6,61%	6,07% - 6,60%	6,01% - 6,59%	6,13% - 6,48%	5,84% - 6,35%	5,83% - 6,34%
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas wilayah yang sesuai peruntukan dalam RTRW dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kota Yogyakarta	69,50%	70%	85,22%	70,50%	71%	71,50%	85,23%	85,24%	85,25%
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas wilayah yang sesuai peruntukan dalam RTRW dibandingkan dengan luas wilayah Kota Yogyakarta	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW / luas wilayah Kota Yogyakarta	69,50%	70%	85,22%	70,50%	71%	71,50%	85,23%	85,24%	85,25%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Vegetasi (persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta).	0,376 IKA + 0,405 IKU + 0,219 IKL	56,36 skala 0-100	54,66 skala 0-100	52,06 skala 0-100	55,19 skala 0-100	55,47 skala 0-100	55,87 skala 0-100	55,19 skala 0-100	56,8006 - 57,42 skala 0-100	56,8789 - 57,50 skala 0-100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Vegetasi (persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta).	0,376 IKA + 0,405 IKU + 0,219 IKL	56,36 skala 0-100	54,66 skala 0-100	52,06 skala 0-100	55,19 skala 0-100	55,47 skala 0-100	55,87 skala 0-100	55,19 skala 0-100	56,8006 - 57,42 skala 0-100	56,8789 - 57,50 skala 0-100
Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) didapatkan dari rasio IPM perempuan dibandingkan rasio IPM laki-laki	Rasio IPM perempuan dengan laki-laki	98,17 skala 0-100	98,50 skala 0-100	98,48 Skala 0-100	98,52 skala 0-100	98,54 skala 0-100	98,56 skala 0-100	98,52 skala 0-100	98,54 skala 0-100	98,56 skala 0-100
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	Indeks keberdayaan masyarakat didapatkan dari prosentase yang diperoleh dari penjumlahan Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah, Hasil Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) + 15% Persentase Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA) + 15% Indikator Kota Ramah Lansia + 15% Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta	[40% Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah + 15% Hasil Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) + 15% Persentase Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak (Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA) + 15% Indikator Kota Ramah Lansia + 15% Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta	73,84 skala 0-100	73,85 skala 0-100	75,54 skala 0-100	74,39 skala 0-100	76,74 skala 0-100	77,14 skala 0-100	-	-	-
			Indeks keberdayaan masyarakat didapatkan dari prosentase yang diperoleh dari penjumlahan Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan, Persentase Capaian KLA sesuai indikator Kemen PPA, Indikator Kota Ramah Lansia, dan Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta	[40% Capaian Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah + 15% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan + 15% Persentase Capaian KLA sesuai indikator Kemen PPA + 15% Indikator Kota Ramah Lansia + 15% Hasil Penilaian Kota Inklusif (Disabilitas) Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	78,00 skala 0-100	78,37 skala 0-100	78,81 skala 0-100

Tabel Perbaikan Kinerja Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran						Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran				
						2023		2024		2025		2026		2024	2025	2026
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta		Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta didapatkan dari Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB	76,27 Poin	76,47 Poin	89,25 Poin	76,67 Poin	76,87 Poin	77,07 Poin	76,67 Poin	76,87 Poin	77,07 Poin			
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Hasil Evaluasi Inspektorat DIY atas Implementasi SAKIP	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai	A nilai			
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didapatkan dari Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat	WTP predikat		
Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas diambil dari BPS	Angka Kriminalitas menurut BPS	534 kasus	530 kasus	703 kasus	525 kasus	520 kasus	515 kasus	700 kasus	695 kasus	690 kasus			
		Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda didapatkan dari jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	4187 kasus	4.185 kasus	4.175 kasus	4.180 kasus	4.175 kasus	4.170 kasus	4.170 kasus	4.165 kasus	4.160 kasus			
	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas diambil dari BPS	Angka Kriminalitas menurut BPS	534 kasus	530 kasus	703 kasus	525 kasus	520 kasus	515 kasus	700 kasus	695 kasus	690 kasus			
		Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda didapatkan dari jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	4187 kasus	4.185 kasus	4.175 kasus	4.180 kasus	4.175 kasus	4.170 kasus	4.170 kasus	4.165 kasus	4.160 kasus			
Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait Indeks prasarana umum wilayah, Indeks prasarana perumahan dan permukiman, Persentase pengelolaan sampah perkotaan, Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran, dan Kelancaran lalu lintas	15% Indeks prasarana umum wilayah + 10% Indeks prasarana perumahan dan permukiman + 25% Persentase pengelolaan sampah perkotaan + 25% Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran + 25% Kelancaran lalu lintas	89,09 Skala 0-100	89,82 Skala 0-100	92,12 Skala 0-100	90,55 Skala 0-100	91,31 Skala 0-100	91,92 Skala 0-100	92,13 Skala 0-100	92,14 Skala 0-100	92,15 Skala 0-100			
	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait Indeks prasarana umum wilayah, Indeks prasarana perumahan dan permukiman, Persentase pengelolaan sampah perkotaan, Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran, dan Kelancaran lalu lintas	15% Indeks prasarana umum wilayah + 10% Indeks prasarana perumahan dan permukiman + 25% Persentase pengelolaan sampah perkotaan + 25% Ketahanan daerah terhadap bencana dan kebakaran + 25% Kelancaran lalu lintas	89,09 skala 0-100	89,82 Skala 0-100	92,12 Skala 0-100	90,55 skala 0-100	91,31 Skala 0-100	91,92 Skala 0-100	92,13 Skala 0-100	92,14 Skala 0-100	92,15 Skala 0-100			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup dari BPS	Angka kematian menurut umur	74,76 tahun	74,83 tahun	75,52 tahun	74,88 tahun	74,89 tahun	74,90 tahun	75,53 tahun	75,54 tahun	75,55 tahun			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup dari BPS	Angka kematian menurut umur	74,76 tahun	74,83 tahun	75,52 tahun	74,88 tahun	74,89 tahun	74,90 tahun	75,53 tahun	75,54 tahun	75,55 tahun			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		2024			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	51,39 nilai	53,94 nilai	91,58	56,48 nilai	56,48 nilai	56,48 nilai	77,28 skor	78,12 skor	78,22 skor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	38,81 nilai	40,27 nilai	77,33	41,72 nilai	41,72 nilai	41,72 nilai	57,77 skor	59,45 skor	59,55 skor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	60,10 nilai	63,12 nilai	93,59	66,14 nilai	66,14 nilai	66,14 nilai	88,2 skor	91,7 skor	91,8 skor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan / rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan X 100%	52,81 nilai	54,80 nilai	76,90	56,78 nilai	56,78 nilai	56,78 nilai	83,39 skor	84,39 skor	84,49 skor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	(jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / jumlah total sekolah dasar) x 100%	-	98,78 %	98,79%	99,39%	100,00%	100,00 %	99,39%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	(jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%	-	98,30 %	98,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan		Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar = (Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar SD	Angka Partisipasi Kasar SD dari jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun, dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Murni SD	Angka Partisipasi Murni SD dihitung dari jumlah siswa SD usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun, dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP dihitung dari jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Murni SMP	Angka Partisipasi Murni SMP dihitung dari jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x100%	88,35 %	88,66 %	90,49%	88,85 %	89,07 %	89,17 %	88,85 %	89,07 %	89,17 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan) x 100%	(Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di sekolah formal yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan) x 100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 12-15 tahun) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	-	111,98 %	100,00%	112,24 %	113,38 %	114,08 %	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	-	105,96 %	19403	106,09 %	106,21 %	106,34 %	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%	-	93,20 %	100%	93,25 %	93,30 %	93,35 %	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%	-	90,9 %	62,53%	91,8 %	92,7 %	93,6 %	97,71%	98,17%	98,62%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar SD	APK SD = (Jumlah siswa SD / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	89,81%	98,79 %	105,22%	98,88 %	98,97 %	99,00 %	105,24%	105,26%	105,28%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Murni SD	APM SD = (Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	89,43%	98,37 %	100,00%	98,46 %	98,55 %	98,64 %	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar SMP	APK SMP = (Jumlah siswa SMP / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	97,02%	97,11 %	112,39%	97,20 %	97,29 %	97,38 %	112,41%	112,43%	112,45%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Angka Partisipasi Murni SMP	APM SMP = (Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	89,50%	90,24 %	100,00%	94,99 %	96,99 %	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	(Jumlah guru sesuai kualifikasi / Jumlah Guru) x 100%	-	97,15 %	100,00%	97,20 %	97,25 %	97,30 %	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka		Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	(40% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan + 40% Persentase kapasitas daya saing keolahragaan + 20% Persentase kwaran dan gugus depan yang aktif) dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Persentase kapasitas pemuda, olahraga, dan kepramukaan yang aktif	(10% Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan + 20% Persentase kapasitas daya saing keolahragaan + 70% Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan) dikali 100	84,81%	88,95%	89,37%	89,30%	89,65%	90,01%	90,25%	90,54%	90,85%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	(jumlah pemuda yang berwirausaha (16-30 tahun) + jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (16-30 tahun) / jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kota Yogyakarta dikali 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	(jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dibagi jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dikali 100%)	50,39%	58,17%	64,59%	61,07%	64,12%	67,32%	67,11%	69,01%	70,63%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	rerata persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional, persentase lembaga olahraga masyarakat yang aktif, persentase perolehan medali tingkat propinsi/nasional, persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Persentase kapasitas daya saing keolahragaan	rerata persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional, persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif, persentase perolehan medali tingkat propinsi/nasional, persentase sarana olahraga yang dikelola dengan baik	-	83,00%	64,54%	83,10%	83,15%	83,20%	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				kapasitas daya saing keolahragaan = rerata (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Nasional) + (persentase lembaga kelompok olahraga masyarakat yang aktif) + (persentase Perolehan medali berdasarkan target sebelum pertandingan/event yang diraih pd saat akhir pertandingan tingkat Propinsi) + persentase sarana olahraga yang dikelola dengan baik	-	-	-	-	-	-	67,68%	68,19%	68,95%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	(Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) /Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) x 100%)	-	95%	100,00%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma	8 orang	8 orang	0 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 Orang	4 Orang	4 Orang	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi	(Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama) x 1000	10,88 per 1000 kelahiran hidup	10,78 per 1000 kelahiran hidup	7,42 per 1000 kelahiran hidup	10,68 per 1000 kelahiran hidup	10,58 per 1000 kelahiran hidup	10,48 per 1000 kelahiran hidup	10,68 per 1000 kelahiran hidup	10,58 per 1000 kelahiran hidup	10,48 per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang / jumlah balita yang dilimbang di Kota Yogyakarta) x 100	7,97 %	7,97%	5,46%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting	(Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -2 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita yang diukur di Kota Yogyakarta) x 100	12,00 %	12,00 %	11,76%	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	12,00 %	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/(Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(Jumlah KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	(Jumlah penderita DBD yang dilangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang dilemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	(Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidimiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100 %	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarnya berkisar antara 0 – 1	-	0,41 Indeks	0,44 Indeks	0,42 Indeks	0,43 Indeks	0,44 Indeks	0,42 Indeks	0,43 Indeks	0,44 Indeks	Dinas Kesehatan
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2023		Target			2024	2025	2026		2024	2025	2026
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Nilai hasil pengukuran survei kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama pada kurun waktu tertentu	-	80 Indeks	82,85 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	Dinas Kesehatan			
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	-	80 Indeks	83,72 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	80,5 Indeks	81 Indeks	81,5 Indeks	Dinas Kesehatan			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	-	46%	55,92%	51%	56%	61%	51%	56%	61%	Dinas Kesehatan			
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	-	61 %	74,61%	62 %	63 %	64 %	62 %	63 %	64 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%	-	54 %	100,00%	56 %	58 %	60 %	90 %	91 %	92 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	-	77,23 %	100,00%	77,50 %	77,60 %	77,80 %	83,00%	84,00%	85,00%	Dinas Kesehatan			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %	-	99,20 %	100,00%	99,30 %	99,40 %	99,50 %	99,30 %	99,40 %	99,50 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 %	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	-	98 %	100%	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	(Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN / Jumlah semua Penduduk Kota Yk) x 100%	-	100%	100,56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	-	95 %	99,95%	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	-	90 %	100,00%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Dinas Kesehatan			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi Paripurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	-	86,84 %	100,00%	86,84 %	89,47 %	89,47 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	-	89 %	89,75%	90 %	91 %	92 %	90 %	91 %	92 %	Dinas Kesehatan
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrnmg kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%	-	82,20 %	100,00%	82,30 %	82,40 %	82,50 %	82,30 %	82,40 %	82,50 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	87,5 %	100,00%	90 %	92,5 %	95 %	90 %	92,5 %	95 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	87,5 %	100%	90 %	92,5 %	95 %	90 %	92,5 %	95 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	-	87,5 %	100,00%	90 %	92,5 %	95 %	90 %	92,5 %	95 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %	-	76 %	100%	77 %	79 %	80 %	77 %	79 %	80 %	Dinas Kesehatan
			Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan pergerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan pergerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun, dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase kemantren yang melaksanakan Gemas	Jumlah kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat gemas minimal 1 kali dalam 1 tahun, dibagi jumlah kemantren di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rerata dari indeks perencanaan SDM, indeks kinerja SDM, indeks kompetensi SDM, dan indeks pengembangan SDM	-	3,6 Skala 0-5	5 Skala 0-5	3,7 Skala 0-5	3,8 Skala 0-5	3,9 Skala 0-5	4,6 Skala 0-5	4,8 Skala 0-5	5 Skala 0-5	Dinas Kesehatan
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	95 %	102,89%	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang tersertifikasi laik hygiene sanitasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	90 %	100%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	90 %	100%	90 %	90 %	90 %	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah terverifikasi memenuhi persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
			Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen dibagi jumlah PIRT yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	80 %	98,46%	80 %	80 %	80 %	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi di sistem OSS dibagi Jumlah Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mengajukan di sistem OSS dikali 100%	-	-	-	-	-	-	85%	85%	85%	Dinas Kesehatan
			Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen dibagi Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	-	-	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif Mandiri dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	-	80,00%	84,44%	86,67 %	93,33 %	100 %	86,67 %	93,33 %	100 %	Dinas Kesehatan
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Skor Akreditasi RS	Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	80 %	80 %	93,27%	81 %	82 %	83 %	81 %	82 %	83 %	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	(Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100	-	80 %	93,41%	81 %	82 %	83 %	84	85	86	Dinas Kesehatan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal = $(\sum \text{Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal} : \sum \text{Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola}) \times 100\%$	-	80,25 %	80,97%	80,50 %	80,75 %	81 %	80,50 %	80,75 %	81 %	Dinas Kesehatan
			Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	Persentase tercapainya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan medis RS = $(\sum \text{Indikator SPM yang Tercapai} : \sum \text{Indikator SPM Pelayanan Medis}) \times 100$	-	80 %	88,89%	81 %	82 %	83 %	83	84	85	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase pendapatan BLUD Rumah Sakit	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	-	100 %	111,56%	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran	Persentase Capaian Pendapatan BLUD Rumah Sakit dalam 1 Tahun Anggaran = $\text{Realisasi Pendapatan} : \text{Target Pendapatan dalam 1 Tahun Anggaran} \times 100$	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	CC Nilai	CC Nilai	BB Nilai	CC Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter							CC Nilai	B Nilai	B Nilai		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kesehatan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah		Indeks prasarana umum wilayah	$35\% (\text{Capaian kinerja penyelenggaraan jalan jembatan/bina marga}) + 30\% (\text{Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase}) + 20\% (\text{Capaian kinerja penataan bangunan gedung}) + 5\% (\text{Capaian kinerja pengembangan jasa konstruksi}) + 10\% (\text{Capaian kinerja penerangan jalan umum ramah lingkungan})$ dikali 100	85,36 Indeks	89,11 Indeks	91,04 Indeks	90,14 Indeks	91,14 Indeks	92,05 Indeks	90,31 Indeks	91,21 Indeks	92,12 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	$(\text{Panjang talud dan saluran kondisi baik} / \text{Total panjang talud dan saluran air}) \times 100 \%$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	$(\text{Panjang talud kondisi baik} + \text{saluran irigasi kondisi baik}) / (\text{Panjang talud} + \text{panjang saluran irigasi}) \times 100\%$	-	92,29%	92,60%	92,31%	92,32%	92,33%	92,63%	92,66%	92,69%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	$(\text{Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan} / \text{Total panjang saluran drainase}) \times 100\%$	-	87,66%	88,36%	87,70%	87,73%	87,77%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	$(\text{Panjang saluran drainase dalam kondisi baik} / \text{Total panjang saluran drainase}) \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	88,40%	88,43%	88,46%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	$(\text{Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab} / \text{Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah}) \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2023		2024			2025				2026		
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
			Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	(Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	-	91,50%	91,52%	91,79%	92,27%	92,75%	91,79%	92,27%	92,75%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) = (Jumlah penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) / (Jumlah Total teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	(Jumlah Berita Acara yang diterbitkan / Jumlah konsultasi yang dilaksanakan) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%	-	92,00 %	95,73%	92,25 %	92,50 %	92,75 %	92,25 %	92,50 %	92,75 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	(Jumlah TKK dan BU yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) / (Jumlah Total target peserta pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) x100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	(Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah total target peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi / Jumlah total target badan usaha yang mendapat pembinaan) / 2 x 100%	-	65,00%	72,75%	70,54%	75,30%	78,46%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	(Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi dan tersertifikasi / Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi) + (Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun / Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun) / 2 x 100%	-	-	-	-	-	-	70,83%	73,70%	76,62%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Indeks prasarana perumahan dan permukiman	[50% (Rata-rata capaian kinerja program kawasan permukiman; capaian program penataan bangunan dan lingkungannya; dan capaian program pengembangan perumahan) + 45% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah) + 5% (Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan air minum)] dikali 100	52,23 Indeks	55,37 Indeks	58,06 Indeks	55,87 Indeks	56,37 Indeks	56,93 Indeks	56,52 Indeks	57,53 Indeks	58,53 Indeks	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	(Jumlah capaian kinerja pelayanan air minum PDAM) / (Jumlah Total kinerja pelayanan air minum PDAM) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	(Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan / Total rumah tangga) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	(Jumlah KK dengan jamban tangki layak + Jumlah KK dengan jamban bersama layak + Jumlah KK dengan MCK komunal + Jumlah KK dengan tangki septik komunal) / Jumlah total KK x 100%	61,17%	59,85%	59,18%	58,80%	57,74%	56,70%	58,80%	57,74%	56,70%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
				(Jamban keluarga dengan tangki septick aman) / Jumlah total KK x 100%	-	20,06%	20,50%	21,05%	22,02%	22,96%	21,05%	22,02%	22,96%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				(Jumlah KK dengan Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi + Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal) / Jumlah total KK x 100%	-	19,00%	19,24%	19,06%	19,15%	19,24%	19,52%	19,66%	19,71%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	(Kawasan dengan sarana prasarana baik / Total kawasan) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	(Luas kawasan dengan sarana prasarana baik / Total luas kawasan permukiman) x 100 %	-	93,89%	94,58%	94,09%	94,29%	94,49%	94,98%	95,38%	95,78%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan) x 100%	-	-	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%	-	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun / Target pendapatan tahun berjalan) x 100%	-	97,58%	110,67%	97,91%	98,27%	99,41%	80,00%	80,80%	81,61%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	-	20,52 %	29,45%	23,14 %	25,75 %	28,37 %	34,68%	39,91%	45,14%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	(Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU) x 100 %	-	75,18%	75,96%	81,45%	87,64%	93,75%	81,45%	87,64%	93,75%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	AA Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang ditambah 50% Persentase penilaian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	80,53	84,84	87,23	89,63	93,47	97,32	87,90	92,40	96,90	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				((33% Jumlah Pengawasan tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengawasan yang direncanakan) ditambah (33% Jumlah Pengendalian tata ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengendalian Tata ruang yang direncanakan) ditambah (34% Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang diterbitkan dibagi Jumlah Layanan Pemanfaatan Tata Ruang yang dimohonkan)) dikali 100%	-	89,61%	93,45%	93,08%	96,54%	100,00%	91,91%	95,96%	100,00%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				((25% Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RTRW yang direncanakan) ditambah (25% Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang selesai disusun dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Turunan RTRW/RDTR yang direncanakan) ditambah (15% Jumlah Kajian Kelitbang Tata Ruang yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kajian Kelitbang Tata ruang yang disusun) ditambah (20% Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan Tata Ruang yang direncanakan)) dikali 100%	-	80,07%	81,01%	86,18%	90,41%	94,64%	83,89%	88,85%	93,81%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	66% persentase pensertifikatan tanah pemkot + 34 % persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				(50% Persentase pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot ditambah 50% Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah) dikali 100	86,95%	92,73%	93,74	93,02%	93,31%	93,60%	95,82	99,33	99,62	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	Jumlah Penanganan terhadap Masalah Pertanahan yang Terfasilitasi Dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk. x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	(Jumlah Masalah Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk) dikali 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	Jumlah BA musyawarah negosiasi pengadaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				(Jumlah tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaan tanah pemkot pada tahun-n) dikali 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatnya dibagi Data aset tanah pemkot x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				(Jumlah Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan pensertifikatnya dibagi Data aset tanah pemkot) dikali 100%	-	85,45%	87,49%	86,03%	86,61%	87,20%	91,63%	98,65%	99,23%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Surat Rekomendasi/Jawaban Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP	(Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP dibagi Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang masuk) dikali 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan persertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Persertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				(Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan persertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Persertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten) dikali 100%	-	81,22%	81,22%	86,74%	88,95%	91,16%	86,74%	88,95%	91,16%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	(Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev) dikali 100%	-	25,00 %	100,00%	50,00 %	75,00 %	100 %	42,03%	71,01%	100,00%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	94,73%	96,86%	97,22%	97,67%	98,43%	99,21%	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
				30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20%Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	94,73%	96,86%	97,22%	97,67%	98,43%	99,21%	97,67%	98,43%	99,21%	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. (jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung, 10 Linmas) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dengan bobot komposit 50% 2. (jumlah kampung panca tertib yg terbentuk) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20 % ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk) dibagi (Target pembentukan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 % 3. (jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (jumlah kampung di Kota Yk) dikali 100% dengan bobot komposit 20% ditambah (Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan) dibagi (Target penumbuhan sekolah panca tertib) dikali 100% dengan bobot komposit 5 %	-	87,30%	87,30%	91,34%	94,90%	98,57%	91,34%	94,90%	98,57%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	(25% dari jumlah hasil kajian peraturan perUuan ditambah 25% Bimbingan Intelektual/Konseling SDM Pol PP) ditambah (25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang memahami peraturan ditambah 25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang lulus samapta)	-	97,00 %	98,82%	97,00 %	97,25 %	97,50 %	97,00 %	97,25 %	97,50 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada) dibagi (Jumlah Total Pelanggaran Perda dan Perkada) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran		Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran+ 30% edukasi pteksi kebakaran+ 40% response time) dikali 100	99,40 Skala 0-100	99,46 Skala 0-100	100 Skala 0-100	99,52 Skala 0-100	99,58 Skala 0-100	99,64 Skala 0-100	99,52 Skala 0-100	99,58 Skala 0-100	99,64 Skala 0-100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase edukasi proteksi kebakaran	[50% (Jumlah penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran dibagi jumlah titik rawan bencana kebakaran) + 50% (Jumlah edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik yang dilayani dibagi jumlah permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik)] x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)	(Jumlah layanan pemadaman dalam kota sesuai respon time 15 menit) / Jumlah kejadian kebakaran dalam kota x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu / Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang dilayani/ Jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	(Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota dan luar kota (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	50% kesiapsiagaan penanggulangan bencana + 30 % evakuasi korban bencana dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap + 20% penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana) dikali 100	92,90 Skala 0-100	88,38 Skala 0-100	88,38 Skala 0-100	91,03 Skala 0-100	91,67 Skala 0-100	92,32 Skala 0-100	91,03 Skala 0-100	91,67 Skala 0-100	92,32 Skala 0-100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100	-	76,76%	76,76%	82,06%	83,35%	84,64%	82,06%	83,35%	84,64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JIUPASNA) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial		Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	((24%*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial)+(29%*(Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti+Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti+Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti+Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti+Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota/5))+(8%*Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri)+(18%*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial)+(4%*Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial)+(17%*Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif))*100%		87,86%	92,53%	92,74%	93,01%	93,28%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indeks Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	(20%*(Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial)+(29%*(Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti)+(Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti)+(Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti)+(Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti)+(Persentase Jumlah Warga Negara Korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah langgap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/5)+(5%*(Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri)+(15%*(Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial)+(4%*(Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial)+(12%*(Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif)+(15%*(Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan)))*100%	-	-	-	-	-	-	94,88%	95,19%	95,50%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Rerata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	-	90,69%	90,69%	91,27%	92,20%	93,14%	91,99%	93,29%	94,59%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar terlantar di luar panti	(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	(Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	(Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	(Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	(Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri/Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun) dikali 100%	-	44,20%	44,20%	45,58%	46,96%	48,40%	45,58%	46,96%	48,40%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	(Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani/Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	81,25%	100,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan ke darurat sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan ke darurat sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan ke darurat sosial dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	-	88,69%	94,08%	89,25%	89,80%	90,36%	92,83%	93,24%	93,66%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	((Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan - Jumlah aduan data kemiskinan sesuai ketentuan)/Jumlah data sasaran intervensi kemiskinan)*100%	-	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	(Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100%	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	(jumlah angkatan kerja-jumlah yang bekerja)/jumlah angkatan kerja x 100%	7,18%	6,97 - 7,18%	6,07%	6,82 - 6,98%	6,61 - 6,68 %	6,38 - 6,53%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	(Jumlah Penempatan Tenaga Kerja + Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja + Jumlah Magang + Jumlah Penempatan Pelatihan)/ Jumlah Penganggur	-	-	-	-	-	-	67,97%	69,27%	69,31%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial	-	69,29%	72,60%	69,99%	70,77%	71,53%	62,47%	63,25%	63,95%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal/Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %	-	91,95%	91,97%	92,01%	92,31%	92,60%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan	(Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan/Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan) x 100 %	-	-	-	-	-	-	92,01%	92,31%	92,60%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	(jumlah tenaga kerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan kerja*100%	-	75,52%	84,88%	75,69%	75,86%	75,95%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online	(Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online/Jumlah lowongan kerja)*100%	-	-	-	-	-	-	53,11%	53,15%	53,19%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja		Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah/Jumlah Total Perusahaan dikali 100%	3-3,8 %	3,8-4,6 %	6,25%	4,6-5,4 %	5,4-6,2 %	6,2-7 %	6,81%	7,38%	7,95%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	(Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %	-	40,39%	40,94%	42,27%	44,15%	46,03%	42,31%	44,29%	46,05%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran/Total Kerjasama yang terjalin dikali 100%	18,75 %	15,63 %	26,67%	18,75 %	21,86 %	25,00 %	35,29%	42,11%	47,62%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	(Jumlah calon transmigran yang berangkat / Jumlah kuota transmigran)*100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase peminat transmigrasi yang ditempatkan	(Jumlah calon transmigran yang berangkat / Jumlah Animo Pendaftar Transmigrasi)*100%	-	-	-	-	-	-	15,00%	16,00%	16,67%	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya keberdayaan perempuan	Meningkatnya keberdayaan perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rasio IPM perempuan dengan laki-laki	98,48 (skala 0-100)	98,50 (skala 0-100)	98,47 (skala 0-100)	98,52 (skala 0-100)	98,54 (skala 0-100)	98,56 (skala 0-100)	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase keberdayaan perempuan	(Proporsi ASN Perempuan terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta * 25%) + (Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta * 25%) + (Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran KUA PPAS * 50%) / 3	-	-	-	-	-	-	19,95%	20,05%	20,15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%	-	80,00%	93,33%	82,42%	87,91%	95,60%	93,41%	94,51%	95,60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah korban kekerasan perempuan/ jumlah penduduk perempuan)*100%	0,10 %	0,10 %	0,10%	0,10 %	0,10 %	0,09 %	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Rasio kekerasan terhadap perempuan per seribu penduduk perempuan	(Jumlah korban kekerasan perempuan : jumlah penduduk perempuan) x 1000	-	-	-	-	-	-	1,02 - 2	0,92 - 1,9	0,82 - 1,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	(Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%	-	88,10%	88,53%	89,05%	90,00%	91,00%	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani	(Jumlah korban kekerasan perempuan yang tertangani/ Jumlah korban kekerasan perempuan) *100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak		Menurunnya kekerasan terhadap anak	(Jumlah korban kekerasan anak/ jumlah penduduk anak)*100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Prevalensi kekerasan terhadap anak	(Jumlah korban kekerasan anak/ jumlah penduduk anak)*100%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Rasio kekerasan terhadap anak per seribu penduduk anak	(Jumlah korban kekerasan anak : jumlah penduduk anak) x 1000	-	-	-	-	-	-	0,82 - 2	0,72 - 1,9	0,62 - 1,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Capaian KLA sesuai indikator Kemen PPA	-	-	-	-	-	-	Utama	Utama	Utama	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	(Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani	(Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalnya jumlah penduduk	Terkendalnya jumlah penduduk		CBR (Crude Birth Rate)	(Jumlah kelahiran tahun n : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun n) x 1000 penduduk	11-10 CBR	10-9 CBR	5,87	9-8 CBR	9-8 CBR	9-8 CBR	5-8 CBR	5-8 CBR	5-8 CBR	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	(40% ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender + 60% lembaga yang memanfaatkan)	-	65,27%	87,03%	77,10%	88,17%	100%	90,21%	94,37%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	(Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB / Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%	-	50,70 %	62,58%	51,00 %	51,30 %	51,60 %	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	(Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Modern : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%	-	-	-	-	-	-	62,59%	62,60%	62,61%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	(Jumlah Kampung KB Berkelanjutan / Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) x 100%	-	53,33 %	68,89%	68,89 %	84,44 %	100 %	71,11%	84,44%	100,00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) / Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100%	-	24,12 %	16,18%	23,59 %	22,53 %	22 %	16,17%	16,16%	16,15%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	(Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna / Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%	-	5,03%	11,77%	6,14%	7,19%	8,13%	12,71%	12,82%	12,93%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan		Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan dihitung terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018.	89,7 poin	90,4 poin	91,2 poin	91,2 poin	92,1 poin	93,1 poin	91,2 poin	92,1 poin	93,1 poin	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	28,88 %	28,89%	37,78 %	46,67 %	55,56 %	37,78 %	46,67 %	55,56 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	Hasil analisa neraca bahan makanan	-	2611,9 kkal/kapita/hari	2745,31 kkal/kapita/hari	2616,9 kkal/kapita/hari	2621,9 kkal/kapita/hari	2626,9 kkal/kapita/hari	2616,9 kkal/kapita/hari	2621,9 kkal/kapita/hari	2626,9 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dibagi Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah dikali 100%	-	54,21 %	54,21%	69,46 %	84,71 %	100 %	69,46 %	84,71 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Wilayah rawan pangan prioritas 2	Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2	-	3 wilayah	0 Wilayah	2 wilayah	1 wilayah	0 wilayah	2 wilayah	1 wilayah	0 wilayah	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlaku dibagi jumlah total sampel pangan dikali 100 persen	88,00%	89,47%	93,41%	90,94%	92,41%	93,88%	85,29%	86,76%	88,24%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dikali 100%	-	26,55 %	26,55%	35,40 %	44,25 %	53,10 %	35,40 %	44,25 %	53,10 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta	-	22,49 %	22,49%	31,24 %	39,98 %	48,72 %	31,24 %	39,98 %	48,72 %	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Meningkatnya Angka konsumsi ikan		Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan berdasarkan hasil survei SUSENAS	35,43 Kg/Kapita/Tahun	35,46 Kg/Kapita/Tahun	35,89 Kg/Kapita/Tahun	35,49 Kg/Kapita/Tahun	35,52 Kg/Kapita/Tahun	35,55 Kg/Kapita/Tahun	35,92 Kg/Kapita/Tahun	35,95 Kg/Kapita/Tahun	35,98 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.	-	1,27 %	3,10%	1,62 %	1,95 %	2,25 %	-	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Peningkatan Persentase unit budidaya ikan yang berizin	Jumlah unit budidaya ikan yang berizin dibagi jumlah unit budidaya ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.	-	-	-	-	-	-	15,79%	18,99%	21,95%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan berdasarkan SUSENAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin dibagi jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100 persen	-	40,00%	40,00%	52,38%	68,18%	82,61%	52,38%	68,18%	82,61%	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100 persen	2,26%	3,99%	5,80%	4,27%	4,55%	4,81%	5,90%	6,19%	6,46%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi dibagi jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas dikali 100%.	-	2,06 %	2,06%	3,54 %	4,72 %	7,08 %	3,54 %	4,72 %	7,08 %	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan baik sesuai fungsinya	-	22 unit	22 unit	23 unit	24 unit	24 unit	23 unit	24 unit	24 unit	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang dibina dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	21,74%	26,45%	24,91%	27,97%	49,11%	24,31%	27,49%	30,61%	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis		Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun berjalan dikurangi jumlah kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen	-11,29%	-11,82%	-68,18%	-12,37%	-12,94%	-13,51%	14,29%	33,33%	50,00%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	41,67 %	66,67%	50 %	58,33 %	66,67 %	75,00%	83,33%	91,67%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	Jumlah Unit Usaha Bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi dibagi Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan dikali 100%	-	61,76 %	100,00%	70,59 %	80,88 %	89,71 %	100%	100%	100%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	(Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas)x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	54,47 %	54,66 %	52,05%	55,19 %	55,47 %	55,87 %	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau + 30% Pengendalian Pencemaran LH	-	-	-	-	-	-	30,93%	31,75%	31,75%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	(Jumlah Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) / (jumlah total Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	(Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai dibagi Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota) dikali 100%	-	25 %	25 %	50 %	75 %	100 %	50 %	75 %	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	(Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi dibagi jumlah KLHS yang telah disusun dan divalidasi) dikali 100%	-	-	-	66,67%	100,00%	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	(jumlah panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai) / (jumlah total panjang sungai) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase kebersihan sungai yg terpelihara	(Panjang sungai yang kebersihannya terjaga dibagi panjang sungai di Kota Yogyakarta) dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	30%Persentase kebersihan sungai yg terpelihara + 70%Persentase inventarisasi sumber pencemar x 100%	75,50%	-	-	-	-	-	75,50%	76,67%	77,83%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	(Jumlah Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan) / (Jumlah Total pemantauan Kualitas Lingkungan) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	(20% Hasil pemantauan kualitas air ditambah 80% Hasil pemantauan kualitas udara) dikali 100%	-	71,30 %	73,74%	72,16 %	72,60 %	73,10 %	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	(Jumlah hasil pemantauan air dan udara yang dilaporkan di aplikasi PPKL KLHK / Jumlah hasil pemantauan air dan udara sesuai SNI) x 100%	-	-	-	-	-	-	52,63%	60,53%	61,40%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	(Jumlah Ruang Terbuka Hijau) / (luas kota Yogyakarta) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
				(Luas Ruang Terbuka Hijau dibagi Luas Kota Yogyakarta) x 100%	-	23,340 %	23,341%	23,343 %	23,346 %	23,349 %	23,343 %	23,346 %	23,349 %	Dinas Lingkungan Hidup
			Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	(Persentase RTH/2) + (Persentase Ketercapaian IKL /2)	51,3370%	-	-	-	-	-	61,6646%	61,6661%	61,6676%	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan pelaporan swapantau	(Jumlah pengawasan dan pelaporan swapantau usaha/kegiatan) / (Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha dibagi Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan) dikali 100%	-	8,00 %	29,94%	12,00 %	15,00 %	19,00 %	33,17%	33,30%	33,43%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dibagi Jumlah Total usaha) dikali 100%	-	80,77 %	76,84%	81,21 %	81,63 %	82,03 %	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	(Jumlah usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dibagi Jumlah Total usaha yang mempunyai izin lingkungan) dikali 100%	-	15,58 %	15,58%	17,43 %	19,27 %	21,08 %	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis penyimpanan LB3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dibagi Jumlah Total usaha) dikali 100%	77,15%	-	-	-	-	-	77,92%	78,66%	79,38%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	(Jumlah Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim) / (Jumlah Total Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Kampung ProKlim	(Jumlah Kampung ProKlim dibagi Jumlah Kampung di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta) dikali 100%	-	59,17%	62,13%	62,13%	65,09%	68,05%	62,13%	65,09%	68,05%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	(Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dibagi Jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) dikali 100%	-	37,42%	35,48%	40,65%	43,87%	47,10%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	(Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan Sekolah Adiwiyata dibagi jumlah seluruh sekolah di kota Yogyakarta) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	73,23%	76,45%	79,68%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Bank sampah yang aktif	(Jumlah Bank Sampah Kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Bank Sampah Baru dibagi Jumlah Total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta) dikali 100%	-	56,92%	72,67%	60,00%	62,98%	65,85%	60,00%	62,98%	65,85%	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan		Persentase Pengelolaan Persampahan	Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
			Capaian Pengelolaan Persampahan	Jumlah Persentase Pengurangan Sampah ditambah Persentase Penanganan Sampah	99,50 %	99,60 %	99,83%	99,60 %	99,70 %	99,70 %	99,60 %	99,70 %	99,70 %	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang berkurang	(Jumlah sampah yang berkurang dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	-	15,00 %	19,29%	16,20 %	17,60 %	19,20 %	16,20 %	17,60 %	19,20 %	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sampah yang tertangani	(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	-	84,60 %	80,54%	83,40 %	82,10 %	80,50 %	83,40 %	82,10 %	80,50 %	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2023		Target			2024	2025	2026		2024	2025	2026
						Target	Realisasi	2024	2025	2026							
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup			
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Lingkungan Hidup			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Lingkungan Hidup			
Meningkatnya terbti kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Meningkatnya terbti kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat		Indeks terbti kepemilikan administrasi kependudukan dan terbti pemanfaatan data	rerata persentase kepemilikan dokumen kependudukan, kepemilikan dokumen pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			Indeks terbti kepemilikan administrasi kependudukan	Rerata Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dikali 100	91,44	92,37	95,85	91,95	92,64	93,33	95,80	95,99	96,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-EI, KIA)	-	87,50%	91,82%	88,60%	89,70%	90,80%	91,83%	92,20%	92,45%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraiian)	-	97,25%	99,88%	97,50%	97,75%	98,00%	99,77%	99,79%	99,80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Rerata Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.		Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)	Kecepatan Rata-rata kendaraan	25 km/jam	25,001 km/jam	26,20 km/jam	25,002 km/jam	25,003 km/jam	25,004 km/jam	25,002 km/jam	25,003 km/jam	25,004 km/jam	Dinas Perhubungan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	Jumlah kendaraan yang lulus dibagi jumlah kendaraan yang diuji di PKB x 100%	-	91,51 %	88,29%	91,52 %	91,53 %	91,54 %	91,52 %	91,53 %	91,54 %	Dinas Perhubungan			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024			
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase juru parkir yang tertib	Jumlah juru parkir resmi yang tertib/jumlah juru parkir resmi x 100%	-	97,60 %	97,60%	97,85 %	98,22 %	98,35 %	97,85 %	98,22 %	98,35 %	Dinas Perhubungan
			Persentase keterlibatan lalu lintas	(Jumlah yang menaati keterlibatan lalu lintas) / (Jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa) x100%	-	83,00 %	78,41%	83,07 %	83,14 %	83,20 %	83,07 %	83,14 %	83,20 %	Dinas Perhubungan
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	((Jumlah ATCS terpasang dengan baik/Jumlah Simpang di Kota Yogyakarta x 100) + (Jumlah rambu terpasang dengan baik/Jumlah kebutuhan rambu di Kota Yogyakarta x 100)/2)	-	68,29 %	68,29%	71,31 %	74,33 %	77,35 %	71,31 %	74,33 %	77,35 %	Dinas Perhubungan
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	(Jumlah Rekomendasi yang dilayani) / (Jumlah Total Pemohon Rekomendasi) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
			Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar	(Jumlah layanan pengendalian dampak lalu lintas sesuai standar) / (Jumlah permohonan layanan yang masuk) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perhubungan
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	(Jumlah Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) / (Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
			Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
			Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	Sarpras parkir yang kondisi baik/jumlah sarpras parkir x 100%	-	94,53 %	94,53%	95,80 %	96,64 %	97,69 %	95,80 %	96,64 %	97,69 %	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Perhubungan
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi Publik		Indeks Layanan Informasi Publik	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				(10% Penyelenggaraan Statistik Sektoral + 40 % Pengelolaan Informasi Publik + 50% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100%	84,19 Skala 0-100	84,47 Skala 0-100	86,61 Skala 0-100	88,87 Skala 0-100	93,27 Skala 0-100	97,94 Skala 0-100	86,14 Skala 0-100	92,18 Skala 0-100	98,24 Skala 0-100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%	-	97,25 %	98,56%	97,50 %	97,75 %	98,00 %	97,50 %	97,75 %	98,00 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	(Jumlah pemberitaan positif dan netral (media cetak) dibagi Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak) x 100%	-	99,90%	97,60%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	(Jumlah konten yang diproduksi dibagi Jumlah rencana produksi konten) x 100%	-	55,71%	68,41%	70,47%	85,24%	100,00%	73,80%	86,90%	100,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun/dipelihara / Jumlah rencana aplikasi) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				(Jumlah aplikasi yang dibangun dibagi Jumlah rencana aplikasi) x 100%	-	86,43%	86,43%	90,95%	95,48%	100,00%	90,95%	95,48%	100,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)/ 2) x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV dibagi Jumlah ruang publik) x 100	-	82,50%	82,50%	87,50%	92,50%	97,50%	87,50%	92,50%	97,50%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	(Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani /Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				(Jumlah ruas jalan yang dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi dibagi Jumlah ruas Jalan Kota di Kota Yogyakarta) x 100%	-	61,22%	62,65%	71,43%	81,63%	91,84%	71,43%	81,63%	91,84%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	(Jumlah pemanfaatan informasi data statistik) / (Jumlah Total informasi data statistik) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase penyesuaian dataset	(Jumlah dataset yang dipublikasikan) dibagi (Jumlah dataset yang dikumpulkan) x 100%	-	83,80%	92,35%	86,59%	89,39%	94,97%	56,52%	77,23%	97,93%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi		Indeks Pengamanan Informasi	(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				Hasil Penilaian Indeks Kemanan Informasi	388 Poin	398 Poin	589 Poin	403 Poin	408 Poin	413 Poin	403 Poin	408 Poin	413 Poin	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	(Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaringan Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta)/(Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta)) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi) / (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
				(Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) dibagi (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi berupa pengujian keamanan informasi) x 100%	-	38%	39%	57%	76%	95%	57%	76%	95%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM		Omset Koperasi	Omset Koperasi Yang Dibina tahun n	397.114.727.829 Rupiah	368.330.174.952 Rupiah	397.157.422.559 Rupiah	369.330.174.952 Rupiah	370.330.174.952 Rupiah	371.330.174.952 Rupiah	397.157.422.559 Rupiah	397.257.422.559 Rupiah	397.357.422.559 Rupiah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	Nilai Omset UKM Usaha Mikro Yang Dibina tahun n	6.720.239.196 Rupiah	5.040.000.000 Rupiah	5.583.232.560 Rupiah	5.760.000.000 Rupiah	6.480.000.000 Rupiah	7.200.000.000 Rupiah	5.760.000.000 Rupiah	6.480.000.000 Rupiah	7.200.000.000 Rupiah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas bak	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	-	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat tahun n	-	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	-	540 SDM	615 SDM	590 SDM	640 SDM	690 SDM	690 SDM	765 SDM	840 SDM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	-	21 Unit	21 Unit	27 Unit	33 Unit	39 unit	27 Unit	33 Unit	39 unit	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	Jumlah UKM yang mempunyai NIB tahun n	-	400 UKM	425 UKM	400 UKM	400 UKM	400 UKM	400 UKM	400 UKM	400 UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru ditumbuhkan tahun n	-	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	100 UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah UKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan kenaikan omset	-	35 UKM	35 UKM	40 UKM	45 UKM	50 UKM	40 UKM	45 UKM	50 UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kinerja sektor industri	Meningkatnya Kinerja sektor industri		Jumlah Tenaga Kerja IKM	Jumlah Tenaga Kerja IKM tahun n	16.425 Orang	16.425 Orang	17.944 Orang	18.718 Orang	21.012 Orang	23.305 Orang	18.718 Orang	21.012 Orang	23.305 Orang	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Nilai Investasi IKM	Nilai investasi IKM yang dibina tahun n	15.948.506.955 Rupiah	15.948.506.955 Rupiah	129.000.000.000 Rupiah	19.165.867.834 Rupiah	22.383.228.713 Rupiah	25.600.589.592 Rupiah	130.935.000.000 Rupiah	132.899.025.000 Rupiah	134.892.510.375 Rupiah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi meningkat / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	-	6,30%	12,05%	6,90%	7,60%	8,30%	6,90%	7,60%	8,30%	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berizin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	-	1,60%	3,86%	1,80%	2,10%	2,40%	1,80%	2,10%	2,40%	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Logam	Pendapatan UPT logam tahun n	-	440.000.000 rupiah	467.746.358 rupiah	490.500.000 rupiah	500.000.000 rupiah	530.000.000 rupiah	490.500.000 rupiah	500.000.000 rupiah	530.000.000 rupiah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi		Nilai investasi	Nilai investasi dalam rupiah di tahun n	308.015.205.801 Rupiah	318.966.195.786 - 733.200.000.000 Rupiah	724.541.834.701.50 Rupiah	323.380.884.182 - 733.200.000.000 Rupiah	345.277.262.488 - 733.200.000.000 Rupiah	358.674.020.272 - 733.200.000.000 Rupiah	323.380.884.182 - 733.200.000.000 Rupiah	345.277.262.488 - 733.200.000.000 Rupiah	358.674.020.272 - 733.200.000.000 Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	Jumlah Investor Baru tahun n	-	237 investor baru	237 investor baru	291 investor baru	345 investor baru	399 investor baru	6.633 investor baru	6.898 investor baru	7.174 investor baru	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	(Jumlah perizinan dan nonperizinan sesuai prosedur / Jumlah permohonan izin dan nonperizinan) x 100%	-	86 %	87,03%	87 %	88 %	89 %	87 %	88 %	89 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	(Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah Pengaduan Pengaduan konsultasi, informasi dan pengaduan yang masuk) x 100%	-	95 %	100%	95 %	95 %	95 %	100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	(Investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM dibagi Investor yang wajib mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM) x 100%	-	18,80 %	61,63%	22,60 %	26,48 %	30,36 %	22,60 %	26,48 %	30,36 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan	Jumlah pemohon yang melakukan proses pemenuhan data dengan tepat dibagi jumlah seluruh pemohon pemenuhan data	-	80 %	100%	80 %	80 %	80 %	83%	86%	89%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	(Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi/Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang dimiliki) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan		Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	Rata-rata (persentase kenaikan sanggar yang ber-NIK + persentase warisan budaya yang dilestarikan)	50 %	55,05 %	56,35%	69,78 %	84,95 %	100 %	69,78 %	84,95 %	100 %	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	-	82,5	85,65	82,5	83,25	84	82,5	83,25	84	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	(Tingkat Ketercapaian pengembangan fasilitas dibagi rencana pengembangan fasilitas) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan	(Jumlah bulan operasional yang dilayani dibagi total bulan dalam 1 tahun) dikali 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni	(Total jumlah kecurahan yang ditetapkan sebagai RKB / 45 kecurahan) dikali 100%	-	82 %	84,4%	87 %	93 %	100 %	87 %	93 %	100 %	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	(Total nilai yg didapat/ nilai maksimal) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan sastra	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra dikali 100%	-	76,61 %	82,15%	77,11 %	77,61 %	78,11 %	77,11 %	77,61 %	78,11 %	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	(Persentase WBB yang direkomendasikan sebagai CB+Persentase WBTB yang dikaji)/2	-	70,11 %	70,33%	79,55 %	89,89 %	100 %	79,55 %	89,89 %	100 %	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengunjung Taman pintar terhadap layanan	-	84 skala 0-100	88,04 skala 0-100	85 skala 0-100	86 skala 0-100	87 skala 0-100	85 skala 0-100	86 skala 0-100	87 skala 0-100	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat		Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = ((UPLM1/AM1) + (UPLM2/AM2) + (UPLM3/AM3) + (UPLM4/AM4) + (UPLM5/AM5) + (UPLM6/AM6) + (UPLM7/AM7)) / 7 x 100	77,21 Skala 1-100	77,31 Skala 1-100	79,75 Skala 1-100	78 Skala 1-100	79 Skala 1-100	80 Skala 1-100	79,75 Skala 1-100	80,25 Skala 1-100	80,75 Skala 1-100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca = (0.3FM + 0.3DM + 0.3JB) + (0.05FAI + 0.05DAI)	-	-	-	-	-	-	74 Skala 1-100	74,5 Skala 1-100	75 Skala 1-100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan dihitung berdasarkan Nilai SKM	-	78 skala 0 -100	82,66 skala 0 -100	78,5 skala 0 -100	79 skala 0 -100	79,5 skala 0 -100	78,5 skala 0 -100	79 skala 0 -100	79,5 skala 0 -100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan (akumulasi)	-	35.126 judul	35.747 judul	35.626 judul	36.126 judul	36.626 judul	37.747 judul	38.447 judul	39.147 judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	35%	35,65%	40%	45%	50%	40,28%	44,91%	49,54%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno di tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat (tahunan)	-	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip		Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan = Pengisian instrumen 6 aspek pengelolaan arsip pada Unit pengolah dan Unit Kearsipan sesuai struktur organisasi di OPD Sesuai formulasi sesuai dengan pembobotan masing-masing komponen	63 Skala 1-100	68 Skala 1-100	88,72 Skala 1-100	73 Skala 1-100	78 Skala 1-100	83 Skala 1-100	88,72 Skala 1-100	89,22 Skala 1-100	89,72 Skala 1-100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan)	-	1000 arsip	1000 arsip	1200 arsip	1400 arsip	1500 arsip	1200 arsip	1400 arsip	1500 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Jumlah arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik dibagi Jumlah OPD di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	68%	100%	70%	72%	74%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik	Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori sangat baik dibagi Jumlah OPD di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	-	-	-	-	-	38%	40%	42%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi)	-	1200 arsip	1200	1400 arsip	1600 arsip	1800 arsip	1400 arsip	1600 arsip	1800 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	Layanan pengguna arsip tertutup dibagi SOP penggunaan arsip tertutup dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2023		2024			2025				2026		
						Target	Realisasi	Target	2025	2026	Target	2025	2026		Target	2025	2026
			Persentase arsip tertutup yang dilayankan	Jumlah arsip tertutup yang selesai dikelola dibagi jumlah arsip tertutup kali 100 persen	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan		Rata-Rata Belanja Wisatawan	Total belanja wisatawan / jumlah wisatawan	1.150.000 Rupiah	1.700.000 Rupiah	2.226.905 Rupiah	1.750.000 Rupiah	1.800.000 Rupiah	1.850.000 Rupiah	-	-	-	Dinas Pariwisata			
Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan		Length of Stay (LoS)	Length of Stay (LoS) = Angka LoS	1,60 Hari	1,70 Hari	1,87 Hari	1,80 Hari	1,90 Hari	2,00 Hari	1,80 Hari	1,90 Hari	2,00 Hari	Dinas Pariwisata			
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	Hasil survei wisata	-	92,35 Skala 0-156	94,16 Skala 0-156	96,97 Skala 0-156	101,82 Skala 0-156	106,91 Skala 0-156	-	-	-	Dinas Pariwisata			
				Hasil survei penilaian kualitas atraksi pariwisata	-	-	-	-	-	-	75,35 skala 0-100	78,28 skala 0-100	81,22 skala 0-100	Dinas Pariwisata			
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%	-	58,80 %	73,17%	61,7 %	64,7 %	67,65 %	-	-	-	Dinas Pariwisata			
				Hasil penghitungan survei Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	-	-	-	-	-	-	56,89	62,06	67,65	Dinas Pariwisata			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara di tahun n	-	65.000 wisatawan	309.674 wisatawan	70.000 wisatawan	75.000 wisatawan	80.000 wisatawan	-	-	-	Dinas Pariwisata			
			Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara	Pergerakan wisatawan mancanegara di tahun n	-	-	-	-	-	-	150.000 Wisatawan	155.000 Wisatawan	160.000 Wisatawan	Dinas Pariwisata			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantera	Jumlah wisatawan nusantara di tahun n	-	3.000.000 wisatawan	7.279.908 wisatawan	3.200.000 wisatawan	3.400.000 wisatawan	3.600.000 wisatawan	-	-	-	Dinas Pariwisata			
			Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantera	Pergerakan wisatawan nusantara di tahun n	-	-	-	-	-	-	5.000.000 Wisatawan	5.100.000 Wisatawan	5.200.000 Wisatawan	Dinas Pariwisata			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata	Jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif dibagi jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
			Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata berbasis wilayah x 100%	-	25%	25%	50%	75%	100%	-	-	-	Dinas Pariwisata
			Persentase SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata x 100%	-	-	-	-	-	-	50%	75%	100%	Dinas Pariwisata
			Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
			Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi	(Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi dengan kriteria sertifikasi dibagi Jumlah Usaha Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi) * 100%	-	56,83 %	56,83%	57,11 %	57,39 %	57,67 %	57,11 %	57,39 %	57,67 %	Dinas Pariwisata
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	-	-	-	Dinas Pariwisata
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pariwisata
Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan		Indeks kinerja perdagangan	(0,2 x kinerja revitalisasi pasar + 0,2 x kinerja Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya + 0,2 x kinerja pengendalian harga bahan pokok + 0,2 x kinerja pembinaan UKM + 0,2 x kinerja tera UTTP)	49,69%	45,21%	55,12%	46,74%	48,27%	49,80%	51,54%	53,02%	54,10%	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%	-	20 %	37,5%	20 %	20 %	20 %	25%	27%	27%	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	Nilai pendapatan retribusi pasar tahun n	-	13.151.500.000 rupiah	14.516.469.810 rupiah	13.279.500.000 rupiah	13.329.500.000 rupiah	13.379.500.000 rupiah	15.015.878.000,00	15.040.878.000,00	15.065.878.000,00	Dinas Perdagangan
			Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	(Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
			Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	(Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat / Jumlah pasar) x 100%	-	31,03 %	31,03%	34,42 %	37,93 %	41,37 %	34,48%	37,93%	41,38%	Dinas Perdagangan
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok/ Target publikasi) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	Jumlah barang kebutuhan pokok yang harganya stabil (tidak mengalami kenaikan harga lebih dari 10% selama 3 hari berturut-turut)/Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau	-	72%	96%	76%	80%	84%	90%	92%	94%	Dinas Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	(jumlah alat UTPP yang bertanda tera sah/ jumlah potensi alat UTPP se-Kota Yogyakarta) x 100%	-	95%	100%	95,20%	95,40%	95,60%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	((OmsetUKMn - OmsetUKMn-1)/OmsetUKMn-1) x 100%	-	8 %	11,06%	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah di tahun n	-	5.311.103.336,16 rupiah	5.517.863.727,00 rupiah	5.315.258.253,28 rupiah	5.346.757.794,35 rupiah	5.421.165.429,24 rupiah	5.598.578.000,00 rupiah	5.631.810.600,00 rupiah	5.632.825.000,00 rupiah	Dinas Perdagangan
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perdagangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Perdagangan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Daerah oleh LAN	-	-	-	-	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	(Jumlah implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dibagi (Jumlah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat) x 100%	33,33 %	40,00%	40,00%	42,86%	55,81%	63,64%	42,86%	55,81%	63,64%	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	(6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat))	-	46,67 %	46,67%	60,01 %	73,34 %	86,68 %	-	-	-	Sekretariat Daerah
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat	Jumlah permasalahan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan strategis bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	-	-	-	-	-	-	89%	90%	91%	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (berdasarkan hasil penilaian Kemendagri)	Tinggi (3,41 - 4,20) Status	Tinggi (3,41 - 4,20) Status	Sedang (3,29) status	Tinggi (3,41 - 4,20) Status	Tinggi (3,41 - 4,20) Status	Sangat Tinggi (4,21 - 5,00) Status	Sedang (3,29-3,34) Status	Sedang (3,35-3,40) Status	Tinggi (3,41-3,44) Status	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Skor dari : 40 % Produk Hukum diharmonisasi dibagi Produk Hukum ditetapkan + 20% Produk Hukum yang ditetapkan dibagi Produk Hukum yang dipublikasi + 20% Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dibagi peraturan perundang-undangan yang terinformasikan + 10% perkara yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang masuk + 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM	-	99,1 Skala 0-100	99,4 Skala 0-100	99,2 Skala 0-100	99,3 Skala 0-100	99,4 Skala 0-100	-	-	-	Sekretariat Daerah
				Skor dari : 45 % Produk Hukum diharmonisasi dibagi Produk Hukum ditetapkan + 20% Produk Hukum yang ditetapkan dibagi Produk Hukum yang dipublikasi + 20% Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dibagi peraturan perundang-undangan yang terinformasikan + 10% perkara yang ditangani dibagi jumlah perkara yang masuk + 5% hasil penilaian Kota Peduli HAM	-	-	-	-	-	-	99,2 Skala 0-100	99,3 Skala 0-100	99,4 Skala 0-100	Sekretariat Daerah

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)						Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						2023		2024			2025			2026			
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Rerata Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan : Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah dibagi Jumlah Kelurahan	-	386 (Cepat Berkembang) Nilai	391,76 (cepat berkembang)	387 (Cepat Berkembang) Nilai	389 (Cepat Berkembang) Nilai	390 (Cepat Berkembang) Nilai	392 (Cepat Berkembang) Nilai	395 (Cepat Berkembang) Nilai	396 (Cepat Berkembang) Nilai	Sekretariat Daerah			
			Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian		Indeks Perekonomian	Indeks Perekonomian = 45% x Kinerja Kebijakan perekonomian + 35% x Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD + 20% x Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	69,73 Skala 0-100	71,32 Skala 0-100	77,09 Skala 0-100	75,34 Skala 0-100	79,37 Skala 0-100	83,39 Skala 0-100	75,34 Skala 0-100	79,37 Skala 0-100	83,39 Skala 0-100	Sekretariat Daerah			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah dokumen kerja sama daerah yg ditindaklanjuti / Jumlah total PKS yang masih berlaku) x 100%	-	93,90%	95,35	94,58%	95,25%	95,93%	94,58%	95,25%	95,93%	Sekretariat Daerah			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan aspek keuangan dan non keuangan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	-	80,77%	92,31	84,62%	84,62%	88,46%	84,62%	84,62%	88,46%	Sekretariat Daerah			
			Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	(Penjumlahan dari realisasi penyusunan bahan kebijakan OPD) / (rencana penyusunan bahan kebijakan perekonomian (dalam persen))	-	57 %	57,14	64 %	71 %	78 %	-	-	-	Sekretariat Daerah			
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian	Jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permasalahan strategis bidang perekonomian yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	-	-	-	-	-	-	89%	90%	91%	Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	95,4 Skala 0-100	94,6 Skala 0-100	99041 Skala 0-100	94,8 Skala 0-100	94,9 Skala 0-100	95,6 Skala 0-100	94,8 Skala 0-100	94,9 Skala 0-100	95,6 Skala 0-100	Sekretariat Daerah			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Penjumlahan dan realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja (dalam persen)	-	98,52 %	99,26%	98,54 %	98,57 %	99,29 %	98,54 %	98,57 %	99,29 %	Sekretariat Daerah			
			Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah x 100%	-	-	-	-	-	-	89%	90%	91%	Sekretariat Daerah			
			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi SIRUP dibagi Total Jumlah Paket Pengadaan) x 100%	-	85,50 %	98,53%	86,00 %	86,50 %	87,00 %	-	-	-	Sekretariat Daerah			
			Persentase Pengadaan Barang / Jasa Memenuhi Standar Pelayanan	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan dibagi total jumlah paket pengadaan sesuai RUP (tender, seleksi, dan tender cepat) dikali 100%	-	-	-	-	-	-	95%	96%	97%	Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100	84,24 Skala 0-100	81,6 Skala 0-100	81,7 Skala 0-100	81,8 Skala 0-100	-	-	-	Sekretariat Daerah			
				Hasil nilai PEKPPP dari KemenpanRB	-	-	-	-	-	-	A-	A-	A-	Sekretariat Daerah			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP); 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah			
			Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai amanat UU Keistimewaan dibagi Jumlah perangkat daerah pengampu keistimewaan dikali 100%	-	25%	25%	50%	75%	100%	-	-	-	Sekretariat Daerah			

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan : (dibagi) jumlah total Perangkat Daerah x (kali) 100%	-	-	-	-	-	-	50%	75%	100%	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Hasil survey responden	-	81,4 Skala 0-100	81,43	81,5 Skala 0-100	81,6 Skala 0-100	81,7 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100	81,6 Skala 0-100	81,7 Skala 0-100	Sekretariat Daerah
			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%	-	87%	93%	92%	95%	100%	-	-	-	Sekretariat Daerah
			Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	Jumlah nilai kematangan organisasi semua Perangkat Daerah sesuai parameter kematangan organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah dengan rentang predikat: Sangat Tinggi (46,1-55) Tinggi (37,1-46) Sedang (28,1-37) Rendah (19,1-28) Sangat Rendah (10-19)	-	-	-	-	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Sekretariat Daerah
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan layanan fasilitas terhadap agenda DPRD	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitas terhadap agenda DPRD		Indeks kepuasan layanan fasilitas terhadap agenda DPRD	Rerata nilai survey kepuasan anggota DPRD, kepuasan tamu, dan kepuasan masyarakat	78 Skala 0 - 100	78,2 Skala 0 - 100	79,6 Skala 0 - 100	78,5 Skala 0 - 100	78,7 Skala 0 - 100	78,9 Skala 0 - 100	79,5 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	81 Skala 0 - 100	Sekretariat DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	Rata-rata persentase kepesertaan Bimtek Anggota Dewan dalam 1 tahun	-	100 %	94,69%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
			Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
			Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	Rerata Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD, Website DPRD, dan Medsos DPRD	-	61,67%	85,24	63,67%	65,67%	67,67%	75 %	76 %	77 %	Sekretariat DPRD

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2023		Target			2024	2025	2026		
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	Rata-rata persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	-	100 %	97,44%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%	-	100 %	87,50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	(60%capaian sasaran pemkot + 20% sasaran perangkat daerah+20% capaian program perangkat daerah) dikali 100	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100	98,17 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				(20% capaian sasaran pemkot + 40% sasaran perangkat daerah + 40% capaian program perangkat daerah) dikali 100	-	-	-	-	-	-	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Rata-rata capaian sasaran daerah	-	92,50 %	97,28	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun	-	-	-	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan	-	92,50 %	99,61 %	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	-	92,50 %	99,25	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	-	92,50 %	99,45	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,60 %	92,70 %	92,80 %	92,80 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	-	63,76 (sangat inovatif) skor	86,11 (sangat inovatif) skor	64,08 (sangat inovatif) skor	64,70 (sangat inovatif) skor	65,00 (sangat inovatif) skor	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	75,00	76,00	77,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / Jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	(25% Kajian telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%	-	91,00 %	92,31	92,00 %	93,00 %	94,00 %	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				(25% Kajian Pemerintah Kota yang telah masuk jurnal atau DSS + 30% Kajian Bappeda yang telah terkomunikasikan kepada OPD + 35% Kajian Bappeda yang menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%	-	-	-	-	-	-	92,00 %	93,00 %	94,00 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100	95,07 Skala 1-100	93,92 Skala 1-100	96,77 Skala 1-100	94,72 Skala 1-100	95,40 Skala 1-100	95,90 Skala 1-100	94,72 Skala 1-100	95,40 Skala 1-100	95,90 Skala 1-100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	-	97,56%	100 %	97,56%	97,56%	97,56%	97,56%	97,56%	97,56%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase penyerapan belanja daerah	Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	-	92,49	94,41	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	-	92,68 %	92,68%	95,12 %	97,56 %	100 %	95,12 %	97,56 %	100 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Nilai Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	725.577.542.997,58 Rupiah	658.724.912.873 Rupiah	803.673.277.479,53 Rupiah	706.603.687.940 Rupiah	739.853.700.334 Rupiah	782.776.222.008 Rupiah	706.603.687.940 Rupiah	739.853.700.334 Rupiah	782.776.222.008 Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%	(Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%	114%	100%	113,79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah di tahun n	-	447.281.800.000 Rupiah	550.547.450.604 Rupiah	481.723.900.000 Rupiah	503.651.970.000 Rupiah	534.077.000.000 Rupiah	481.723.900.000 Rupiah	503.651.970.000 Rupiah	534.077.000.000 Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar di tahun n	-	16.000.000.000 Rupiah	23.367.083.307,14 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	D Nilai	B Nilai	A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara		Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	20% persentase pemenuhan penataan ASN + 10% persentase jabatan fungsional yang terlayani + 15% persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian + 5% persentase jumlah data ASN yang dikelola + 15% persentase pelayanan kesejahteraan pegawai + 10% persentase penyelesaian penilaian kinerja pegawai + 5% persentase ketepatan waktu menyelesaikan Pendidikan + 20% persentase Kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	106,15 Skala 0-100	91,88 Skala 0-100	110,238 Skala 0-100	92,27 Skala 0-100	92,49 Skala 0-100	92,79 Skala 0-100	92,27 Skala 0-100	92,49 Skala 0-100	92,79 Skala 0-100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan	Jumlah ASN yang lulus Diklat Berbasis Keistimewaan dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat Berbasis Keistimewaan kali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase JF yang Terlayani	Jumlah JF yang terlayani di tahun N dibagi Jumlah JF yang mengajukan layanan di tahun N dikali 100%	-	85,99%	100,00%	86,65%	86,97%	87,57%	86,65%	86,97%	87,57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	Jumlah data yang dikelola pada tahun N dibagi Jumlah data pegawai tahun N dikali 100%	-	90,00 %	100,00%	91,00 %	92,00 %	93,00 %	91,00 %	92,00 %	93,00 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dikali 100%	-	83,33 %	100,00	84,62 %	85,71 %	86,67 %	84,62 %	85,71 %	86,67 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	-	100 %	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%	-	92,20 %	100,00%	92,40 %	92,60 %	92,80 %	92,40 %	92,60 %	92,80 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%	-	88,24%	151,87%	88,38%	88,31%	88,56%	88,38%	88,31%	88,56%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah total PNS x 100%	-	91,00 %	100,00%	92,20 %	92,40 %	92,60 %	92,20 %	92,40 %	92,60 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	-	95,20 %	99,32%	95,36 %	95,60 %	95,80 %	95,36 %	95,60 %	95,80 %	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan		Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Hasil Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap 6 elemen kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	Jumlah penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%	-	91%	100,00%	91,10%	91,20%	92%	94,74%	94,74%	94,74%	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pengelolaan keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di bidang Pengelolaan keuangan dan aset dikali 100%	-	95%	100,00%	95,2 %	96%	97%	95,2 %	96%	97%	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%	-	95%	100,00%	95,2 %	96%	97%	95,2 %	96%	97%	Inspektorat Daerah

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%	-	95%	100,00%	95, 2 %	96%	97%	95, 2 %	96%	97%	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dikali 100%	-	95%	90,91%	95, 2 %	96%	97%	95, 2 %	96%	97%	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	realisasi penilaian RB dibagi bobot penilaian RB dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana x 100%	-	18,18%	36,36%	27,27%	36,36%	63,64%	36,36%	54,55%	63,64%	Inspektorat Daerah
			Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	realisasi penilaian RB dibagi bobot penilaian RB dikali 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Aparatur x 100%	-	18,18%	18,18%	27,27%	45, 45 %	63, 64 %	27,27%	45, 45 %	63, 64 %	Inspektorat Daerah
			Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Lembar Kerja Evaluasi Permenpan RB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	-	40%	40,00%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	Inspektorat Daerah
			Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern dibagi jumlah Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset x 100%	-	20%	80,00	30%	40%	60%	50%	60%	70%	Inspektorat Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Inspektorat		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA nilai	-	-	-	-	Inspektorat Daerah
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter		-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Inspektorat Daerah
Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat		Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	(Jumlah potensi konflik sosial yang dapat diselesaikan / jumlah potensi konflik sosial yang terjadi) x 100%	80 %	81 %	86,36%	82 %	83 %	84 %	82 %	83 %	84 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
			Persentase pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %	-	81 %	82,19%	82 %	83 %	84 %	82 %	83 %	84 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdapat di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100%	-	65,00 %	67,85%	67,00 %	70,00 %	74,00 %	67,00 %	70,00 %	74,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	(Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdapat di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	-	55,00 %	54%	60,00 %	63,00 %	65,00 %	60,00 %	63,00 %	65,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100 %	-	71,00 %	75,45%	72,00 %	73,00 %	74,00 %	72,00 %	73,00 %	74,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik yang terjadi wilayah	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah	Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%	-	76,00 %	80,41%	77,00 %	78,00 %	79,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	388 Poin	388 Poin	388	389 Poin	390 Poin	391 Poin	389 Poin	390 Poin	391 Poin	Kemantren Tegalrejo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Jumlah NRR x nilai tertinggi dibagi dari 9 unsur x 25	-	83,25 poin	83,51	83,5 poin	84,5 poin	85,5 poin	83,5 poin	84,5 poin	85,5 poin	Kemantren Tegalrejo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	Jumlah Swadaya Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	2.148.334.503 Rupiah	3.305.672.310 Rupiah	2.406.134.643 Rupiah	2.694.870.800 Rupiah	3.018.255.296 Rupiah	2.406.134.643 Rupiah	2.694.870.800 Rupiah	3.018.255.296 Rupiah	Kemantren Tegalrejo
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda	-	100 pelanggaran	98 pelanggaran	90 pelanggaran	80 pelanggaran	70 pelanggaran	90 pelanggaran	80 pelanggaran	70 pelanggaran	Kemantren Tegalrejo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Tegalrejo) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Tegalrejo

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Tegalrejo
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	B Nilai	B Nilai	A Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	-	-	-	Kemantren Tegalrejo
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter		-	-	-	-	-	-	B Nilai	B Nilai	B Nilai	Kemantren Tegalrejo
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Tegalrejo
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	401,66 poin	401,66 poin	402,33	402 poin	402,33 poin	402,66 poin	404,00 poin	404,00 poin	404,00 poin	Kemantren Jetis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	88,1 poin	88,12 poin	88,2 poin	88,3 poin	88,4 poin	88,2 poin	88,3 poin	88,4 poin	Kemantren Jetis
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	854.415.900 Rupiah	935.773.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	854.415.900 Rupiah	854.415.900 Rupiah	935.773.000 Rupiah	935.773.000 Rupiah	935.773.000 Rupiah	Kemantren Jetis
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Jumlah Pelanggaran Perda	-	258 pelanggaran	98 pelanggaran	250 pelanggaran	245 pelanggaran	240 pelanggaran	150 pelanggaran	140 pelanggaran	130 pelanggaran	Kemantren Jetis
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Jetis
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Jetis
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Jetis
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter		-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Jetis
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Jetis
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	398,8 poin	398,5 poin	399,0 poin	399 poin	399,5 poin	400 poin	399 poin	399,5 poin	400 poin	Kemantren Gondokusuman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	82,5 poin	82,52 poin	83 poin	83,5 poin	84 poin	83 poin	83,5 poin	84 poin	Kemantren Gondokusuman

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2023		Target			2024	2025	2026		
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Jumlah Swadaya Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	2.728.767.000 Rupiah	2.816.613.506 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	Kemantren Gondokusuman
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pelanggaran Perda	-	250 pelanggaran	248 pelanggaran	225 pelanggaran	200 pelanggaran	175 pelanggaran	225 pelanggaran	200 pelanggaran	175 pelanggaran	175 pelanggaran	Kemantren Gondokusuman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Gondokusuman
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Gondokusuman
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	-	Kemantren Gondokusuman
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gondokusuman
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gondokusuman
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	408 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	409 poin	Kemantren Danurejan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	82,50 poin	82,68 poin	83 poin	83,50 poin	84 poin	83 poin	83,50 poin	84 poin	84 poin	Kemantren Danurejan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah Swadaya Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.137.124.275 Rupiah	1.813.250.000 Rupiah	1.193.980.489 Rupiah	1.253.679.513 Rupiah	1.316.363.489 Rupiah	1.193.980.489 Rupiah	1.253.679.513 Rupiah	1.316.363.489 Rupiah	1.316.363.489 Rupiah	Kemantren Danurejan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	49 Pelanggaran	40 Pelanggaran	48 Pelanggaran	47 Pelanggaran	46 Pelanggaran	48 Pelanggaran	47 Pelanggaran	46 Pelanggaran	46 Pelanggaran	Kemantren Danurejan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Danurejan) x 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Danurejan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Danurejan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	AA Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	-	Kemantren Danurejan
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	Kemantren Danurejan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Danurejan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya pembangunan Kemantren Gedongtengen		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	366,5 poin	373,50 poin	373,50 poin	375,00 poin	376,00 poin	377,00 poin	375,00 poin	376,00 poin	377,00 poin	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	84,76 poin	85,02 poin	85 poin	85,5 poin	86 poin	85 poin	85,5 poin	86 poin	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.022.700.000 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.041.337.000 Rupiah	1.058.282.000 Rupiah	1.072.840.000 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	1.371.031.533 Rupiah	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda	-	123 Pelanggaran	168 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	123 Pelanggaran	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gedongtengen) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Gedongtengen
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Gedongtengen
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Gedongtengen
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gedongtengen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gedongtengen
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Pembangunan Kemantren Ngampilan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	389 poin	403 poin	403 poin	405 poin	407 poin	409 poin	405 poin	407 poin	409 poin	Kemantren Ngampilan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	84,4 poin	84,4 poin	84,6 poin	84,8 poin	85 poin	84,6 poin	84,8 poin	85 poin	Kemantren Ngampilan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	750.000.000 Rupiah	773.290.000 Rupiah	775.000.000 Rupiah	800.000.000 Rupiah	825.000.000 Rupiah	775.000.000 Rupiah	800.000.000 Rupiah	825.000.000 Rupiah	Kemantren Ngampilan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	68 Pelanggaran	67 Pelanggaran	66 Pelanggaran	64 Pelanggaran	62 Pelanggaran	66 Pelanggaran	64 Pelanggaran	62 Pelanggaran	Kemantren Ngampilan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Ngampilan) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Ngampilan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Ngampilan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Ngampilan
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter		-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Ngampilan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Ngampilan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	378,33 poin	379 poin	379 poin	379,66 poin	380 poin	380,66 poin	379,66 poin	380 poin	380,66 poin	Kemantren Wirobrajan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	83,27 poin	83385 poin	83,47 poin	83,67 poin	83,87 poin	83,47 poin	83,67 poin	83,87 poin	Kemantren Wirobrajan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	980.585.000 Rupiah	1.035.955.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1.035.955.000 Rupiah	1.035.955.000 Rupiah	1.035.955.000 Rupiah	Kemantren Wirobrajan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	42 Pelanggaran	58 Pelanggaran	42 Pelanggaran	42 Pelanggaran	40 Pelanggaran	42 Pelanggaran	42 Pelanggaran	40 Pelanggaran	Kemantren Wirobrajan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Wirobrajan) x 100%	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Wirobrajan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Wirobrajan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Wirobrajan
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter		-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Wirobrajan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Wirobrajan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantriheron	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantriheron		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantriheron	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	383 poin	383,67 poin	383,67 poin	384,67 poin	386 poin	387 poin	384,67 poin	386 poin	387 poin	Kemantren Mantriheron
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriheron	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	84,97 poin	84,98 poin	85,00 poin	85,10 poin	85,20 poin	85,04 poin	85,10 poin	85,20 poin	Kemantren Mantriheron

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.572.000.000 Rupiah	1.494.028.580 Rupiah	1.587.000.000 Rupiah	1.602.000.000 Rupiah	1.617.000.000 Rupiah	1.587.000.000 Rupiah	1.602.000.000 Rupiah	1.617.000.000 Rupiah	Kemantren Mantrijeron
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	-	24 Pelanggaran	20 Pelanggaran	24 Pelanggaran	24 Pelanggaran	24 Pelanggaran	20 Pelanggaran	20 Pelanggaran	20 Pelanggaran	Kemantren Mantrijeron
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mantrijeron) x 100%	-	76 %	100%	77 %	78 %	79 %	77 %	78 %	79 %	Kemantren Mantrijeron
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Mantrijeron
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	AA Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	-	-	-	Kemantren Mantrijeron
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Mantrijeron
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Mantrijeron
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	380 Poin	385 Poin	385,55 Poin	390 Poin	395 Poin	400 Poin	391,55 Poin	395 Poin	400 Poin	Kemantren Kraton
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	85,50 poin	85,65 poin	85,75 poin	86,00 poin	86,25 poin	85,75 poin	86,00 poin	86,25 poin	Kemantren Kraton
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.024.570.000 Rupiah	1.199.241.000 Rupiah	1.032.431.000 Rupiah	1.039.635.000 Rupiah	1.045.135.000 Rupiah	1.032.431.000 Rupiah	1.039.635.000 Rupiah	1.045.135.000 Rupiah	Kemantren Kraton
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda	-	36 pelanggaran	32 pelanggaran	36 pelanggaran	36 pelanggaran	36 pelanggaran	36 pelanggaran	36 pelanggaran	36 pelanggaran	Kemantren Kraton
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Kraton
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Kraton
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	Kemantren Kraton
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Kraton

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024			
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Kraton
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Gondomanan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	367,36 poin	368 poin	368,3 poin	369 poin	370 poin	371 poin	369 poin	385 poin	390 poin	Kemantren Gondomanan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Jumlah NRR x nilai tertinggi dari 9 unsur x 25	-	88,62 poin	88,68 poin	88,70 poin	88,73 poin	88,75 poin	88,70 poin	88,75 poin	88,80 poin	Kemantren Gondomanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.032.240.000 Rupiah	570.887.000 Rupiah	1.043.524.000 Rupiah	1.061.035.000 Rupiah	1.072.776.000 Rupiah	1.044.024.000 Rupiah	1.061.035.000 Rupiah	1.073.276.000 Rupiah	Kemantren Gondomanan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	140 Pelanggaran	136 Pelanggaran	130 Pelanggaran	120 Pelanggaran	110 Pelanggaran	130 Pelanggaran	120 Pelanggaran	110 Pelanggaran	Kemantren Gondomanan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Gondomanan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Gondomanan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	AA Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Gondomanan
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gondomanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Gondomanan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	407 poin	Kemantren Pakualaman
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	Jumlah NRR x nilai tertinggi dari 9 unsur x 25	-	82,00 poin	85,14 poin	83,00 poin	84,00 poin	85,00 poin	83,00 poin	84,00 poin	85,00 poin	Kemantren Pakualaman
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	705.000.000 Rupiah	1.166.815.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	Kemantren Pakualaman
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	Jumlah Pelanggaran Perda	-	80 Pelanggaran	80 Pelanggaran	79 Pelanggaran	78 Pelanggaran	77 Pelanggaran	79 Pelanggaran	78 Pelanggaran	77 Pelanggaran	Kemantren Pakualaman

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kamantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kamantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kamantren Pakualaman) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Pakualaman
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kamantren Pakualaman	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kamantren Pakualaman		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Pakualaman
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Pakualaman
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Pakualaman
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kamantren Pakualaman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kamantren Pakualaman	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Pakualaman
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kamantren Mergangsan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kamantren Mergangsan		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kamantren Mergangsan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	400,33 poin	400,67 poin	401,33 poin	402 poin	403 poin	404 poin	402 poin	403 poin	404 poin	Kemantren Mergangsan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kamantren Mergangsan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	85,5 poin	86 poin	86 poin	86,5 poin	87 poin	86 poin	86,5 poin	87 poin	Kemantren Mergangsan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kamantren Mergangsan	Jumlah Swadaya Mumi Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	1.591.231.000 Rupiah	1.673.571.000 Rupiah	1.593.231.000 Rupiah	1.596.231.000 Rupiah	1.598.231.000 Rupiah	1.593.231.000 Rupiah	1.596.231.000 Rupiah	1.598.231.000 Rupiah	Kemantren Mergangsan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kamantren Mergangsan	Jumlah Pelanggaran Perda	-	65 pelanggaran	40 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	Kemantren Mergangsan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kamantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kamantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kamantren Mergangsan) x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Mergangsan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kamantren Mergangsan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kamantren Mergangsan		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Mergangsan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	-	-	Kemantren Mergangsan
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Mergangsan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kamantren Mergangsan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kamantren Mergangsan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Mergangsan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kamantren Umbulharjo	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kamantren Umbulharjo		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kamantren Umbulharjo	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	383,14 poin	388,43 poin	388,43 poin	388,43 poin	388,43 poin	388,43 poin	388,43 poin	391,29 poin	391,29 poin	Kemantren Umbulharjo

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	83,13 poin	86,02 poin	83,13 poin	83,5 poin	84 poin	86,02 poin	86,02 poin	86,02 poin	Kemantren Umbulharjo
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	3.851.825.200 Rupiah	3.852.570.378 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	3.851.825.200 Rupiah	Kemantren Umbulharjo
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pelanggaran Perda	-	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	Kemantren Umbulharjo
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Umbulharjo) x 100%	-	76 %	100 %	77 %	78 %	79 %	100 %	100 %	100 %	Kemantren Umbulharjo
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Umbulharjo
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	BB Nilai	BB Nilai	A Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	-	-	-	Kemantren Umbulharjo
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Umbulharjo
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Umbulharjo

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		Target			2024	2025	2026	
						Target	Realisasi	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	398 poin	399 poin	399,25 poin	399 poin	399 poin	400 poin	399 poin	402,47 poin	402,47 poin	Kemantren Kotagede
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	-	91,00 poin	91,20 poin	91,20 poin	91,40 poin	91,50 poin	91,20 poin	91,40 poin	91,50 poin	Kemantren Kotagede
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	-	3.231.358.000 rupiah	3.252.164.700 rupiah	3.261.358.000 Rupiah	3.291.358.000 Rupiah	3.321.358.000 Rupiah	3.261.358.000 Rupiah	3.291.358.000 Rupiah	3.321.358.000 Rupiah	Kemantren Kotagede
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	Jumlah Pelanggaran Perda	-	36 Pelanggaran	27 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	Kemantren Kotagede
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	(Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemantren Kotagede
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede		Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kemantren Kotagede
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	AA Nilai	-	-	-	Kemantren Kotagede
				Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter	-	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Kotagede
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Kemantren Kotagede

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

SUGENG PURWANTO

